

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Frisma Edward*

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum**

Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**

ABSTRAK

Kepolisian Daerah Sumatera Utara senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan solusinya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan hukum pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan malam.

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa hambatan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Narkotika

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

LAW ENFORCEMENT AGAINST DRUG ADDICTS AND ABUSERS IN THE JURISDICTION OF THE NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE

Frisma Edward*
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum**
Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**

ABSTRACT

The North Sumatra Regional Police always makes efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics. The formulation of the problem in this study is how the legal regulations for drug addicts and abusers, how is the law enforcement against drug addicts and users in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, what are the obstacles to law enforcement against drug addicts and users in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police and their solutions.

This research is a descriptive analytical study that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research.

Legal regulations for drug addicts and abusers are stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where dealers are subject to sanctions with the heaviest punishment, namely the death penalty as stated in Articles 114 and 119. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics in Indonesia. Law enforcement against drug addicts and users in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police includes non-penal policy efforts, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. Pre-emptive efforts carried out are dialogical patrols, while preventive efforts are carried out by conducting raids on night entertainment venues. Based on the results of the discussion, it is known that the obstacles to eradicating the circulation of narcotics in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police are due to limited investigative personnel, limited budget and the ability of investigators in the investigation process of narcotics crimes.

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Narcotics.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*